



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)**

**UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MARJUKI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **1000213**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/130 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 231.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ----**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 13.345.454**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

**Sub Total** **Rp. 3.494.345.454**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.494.345.454

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.